



Konstruksi Identitas Melanesia Negara-Negara Pasifik Selatan dan Respons Indonesia terkait Papua

Aulia Namira Hasibuan^{1*}, Christopher Sebastian Simanjuntak², Razanul Hariz
Habiburrahman³, Deasy Silvy Sari⁴, Dina Yulianti⁵

^{1, 2, 3, 4, 5} Program Studi Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, Indonesia
^{*}aulia23007@mail.unpad.ac.id

Abstract. The Papua issue has become one of the prominent topics in Indonesia's relations with South Pacific countries, particularly due to the shared Melanesian identity between Papuans and many communities in the region. The expansion of digital media has further facilitated the dissemination of narratives surrounding Papua through news coverage, political statements, and international forums, shaping both regional and global public perceptions. This study aims to explain how Melanesian identity is constructed within the digital discourse of South Pacific countries regarding Papua and how Indonesia responds to such identity construction through its diplomatic approaches. This research employs a qualitative approach using a library research method. Data were collected from books, scholarly journals, official documents, institutional reports, and relevant online publications. The analysis utilizes the concept of Political Netnography developed by Robert V. Kozinets and Rossella Gambetti to examine patterns of interaction, narratives, symbols, and the formation of political identities within digital spaces. The findings reveal that Melanesian identity in the digital discourse of South Pacific countries is constructed as a foundation for solidarity with Papua through narratives of human rights, decolonization, and ethnocultural affinity. These narratives are continuously reproduced through online media and international forums, including the United Nations and the Melanesian Spearhead Group. In response, Indonesia employs formal diplomacy, exercises its right of reply in international forums, strengthens cooperation with South Pacific countries, and promotes counter-narratives emphasizing sovereignty, territorial integrity, and development in Papua. The study concludes that the contestation of narratives regarding Papua takes place not only in formal diplomatic arenas but also in digital spaces that play a significant role in shaping collective identities, public opinion, and international perceptions of Papua and Indonesia.

Keywords: Melanesian identity, Papua, South Pacific, political netnography, Indonesian diplomacy

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital menciptakan ruang sosial baru yang memungkinkan orang dari berbagai tempat berinteraksi dan membentuk komunitas secara virtual. Dari sini muncul netnografi, yaitu metode dari etnografi untuk meneliti budaya, perilaku, dan komunikasi dalam komunitas daring. Konsep ini diperkenalkan Robert V. Kozinets pada akhir abad ke-20. Netnografi tidak hanya melihat isi teks, tetapi juga memahami interaksi, makna, dan hubungan sosial dalam ruang digital melalui pengamatan langsung terhadap aktivitas pengguna (Özkoçak, 2024, pp. 4-5).

Isu hak asasi manusia di Papua banyak dibahas dalam ruang digital seiring berkembangnya komunitas online. Kajian akademik menunjukkan perhatian internasional terhadap isu ini berlangsung lama, dari 1981 sampai 2023, dengan fokus yang berubah dari kesehatan, gender, dan pembangunan hingga konflik politik, kebebasan berekspresi, dan aktivitas masyarakat sipil. Isu ini tidak hanya dipandang sebagai masalah keamanan, tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, dan politik yang melibatkan berbagai pihak di tingkat lokal hingga internasional. Karena itu, isu HAM Papua sering muncul dalam diskusi publik dan media digital, termasuk percakapan di kawasan Pasifik Selatan (Zahidi dan Othman, 2024, hh. 111-114).

Penelitian menunjukkan masih ada kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaan perlindungan HAM di Papua. Walaupun sudah ada komitmen dari pemerintah dan organisasi, di lapangan masih muncul masalah seperti kurangnya konsultasi dengan masyarakat, rasa tidak adil, dan keterbatasan sumber daya. Studi di Pegunungan Cyclops juga menemukan bahwa kebijakan konservasi sering tidak sesuai dengan kebutuhan dan praktik masyarakat setempat. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan HAM tidak hanya pada kebijakan, tetapi juga pada pelaksanaannya dan keterlibatan masyarakat (Barnes, et al., 2023, h. 360).

Isu Papua berkaitan erat dengan kawasan Pasifik Selatan karena kedekatan geografis dan hubungan antara negara-negara Melanesia. Wilayah ini meliputi Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu, Fiji, dan Kanak di New Caledonia yang memiliki kedekatan budaya dan sejarah dengan masyarakat Papua. Isu Papua juga dibahas dalam forum Melanesian Spearhead Group (MSG), terutama sejak United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) menjadi observer pada 2015. Hal ini membuat isu Papua tidak hanya menjadi urusan dalam negeri Indonesia, tetapi juga bagian dari diplomasi regional yang melibatkan berbagai negara dan aktor masyarakat sipil di Pasifik Selatan (Sudana, 2024, h. 1).

Papua juga berpengaruh pada arah diplomasi Indonesia di Pasifik Selatan. Dukungan sebagian negara di kawasan ini terhadap isu Papua membuat Indonesia memperkuat hubungan lewat diplomasi yang lebih aktif. Kerja sama yang dibangun mencakup bidang ekonomi, budaya, dan pertahanan seperti bantuan pembangunan, pertukaran budaya, dan latihan militer bersama. Kebijakan ini sejalan dengan Look East Policy untuk mempererat hubungan dengan negara Pasifik Selatan dan memperbaiki citra Indonesia di tingkat internasional, sehingga isu Papua ikut memengaruhi strategi diplomasi regional Indonesia (Prasetyo dan Zahidi, 2022, h. 21).

Berangkat dari meningkatnya perhatian internasional terhadap Papua, isu HAM di wilayah tersebut mengalami internasionalisasi melalui berbagai forum Pasifik Selatan. Eksposur internasional atas dugaan pelanggaran HAM membuat isu Papua tidak lagi dipandang semata sebagai urusan domestik Indonesia. Akibatnya, MSG dan forum Pasifik menjadi ruang penting bagi aktor pro-Papua untuk mengangkat isu tersebut dalam hubungan Indonesia dengan negara-negara Pasifik Selatan (Blades, 2020).

Dukungan negara-negara Pasifik Selatan terhadap Papua didasarkan pada identitas Melanesia yang telah menguat sejak era dekolonisasi 1970an dan menjadi salah satu dasar pembentukan MSG pada tahun 1986. Vanuatu merupakan negara yang paling vokal mendukung Papua, sejalan dengan pernyataan Perdana Menteri pertama Vanuatu, Walter Lini, setelah kemerdekaan tahun 1980 bahwa kemerdekaan bangsa Melanesia belum selesai selama Papua belum merdeka. Karena itu, isu Papua di Pasifik Selatan kerap dipandang sebagai bagian dari solidaritas sesama bangsa Melanesia (Blades, 2020).

Selama periode 2015-2024, pemerintahan Joko Widodo mengalokasikan Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat sebesar Rp168,61 triliun. Pemerintah juga menyelesaikan pembangunan Jalan Trans Papua sepanjang 3.462 kilometer serta meningkatkan IPM Papua dari 57,25 pada 2014 menjadi 63,01 pada 2023. Berbagai capaian tersebut menunjukkan bahwa pembangunan Papua menjadi salah satu prioritas nasional selama satu dekade kepemimpinan Joko Widodo (Blades, 2020). Meskipun pembangunan terus dilakukan, konflik Papua belum menunjukkan penyelesaian yang komprehensif. Dalam diskusi Moya Institute pada 14 September 2021, Steve Rick E. Mara menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia dan kelompok pro-referendum memiliki narasi sejarah yang berbeda mengenai akar konflik Papua. Selain itu, persoalan ketimpangan pembangunan, kesejahteraan, dan dugaan pelanggaran HAM turut memperumit penyelesaiannya, sehingga konflik Papua tidak hanya menyangkut aspek keamanan, tetapi juga dimensi politik, ekonomi, sosial, dan identitas (Nafian, 2021).

Berdasarkan temuan penelitian, identitas Melanesia menjadi faktor utama yang mendorong dukungan negara-negara Pasifik Selatan terhadap isu Papua, yang terlihat melalui pembahasan isu tersebut dalam forum MSG dan PIF sejak dekade 2010-an. Indonesia merespons melalui percepatan pembangunan Papua, pembentukan Daerah Otonomi Baru pada 2022, serta penguatan diplomasi kawasan. Namun, kondisi ideal menuntut penyelesaian yang tidak hanya berfokus pada pembangunan dan keamanan, tetapi juga pada penghormatan HAM, partisipasi politik, dan pengakuan identitas masyarakat Papua. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan Papua memerlukan pendekatan yang menggabungkan pembangunan, dialog, HAM, dan diplomasi regional secara seimbang.

Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada internasionalisasi isu Papua, diplomasi Pasifik Selatan, serta strategi Indonesia menghadapi dukungan negara-negara Melanesia terhadap Papua. Namun, peran media digital dalam pembentukan identitas kolektif dan wacana politik masih relatif sedikit dikaji sehingga menjadi celah yang ingin diisi oleh penelitian ini. Selanjutnya, penelitian berjudul “Dukungan Vanuatu Terhadap Kemerdekaan Papua: Tinjauan Konstruktivisme Holistik” yang ditulis oleh Muhammad Riza Hanafi dan Isnin Nabila Annahda (2022) membahas efektivitas diplomasi Indonesia dalam forum Melanesian Spearhead Group (MSG) terkait isu Papua. Penelitian tersebut menemukan bahwa dukungan sejumlah negara Pasifik Selatan terhadap kelompok yang menyuarakan pemisahan Papua dari Indonesia terus menjadi tantangan bagi diplomasi Indonesia meskipun Indonesia telah menjadi anggota asosiasi MSG dan aktif melakukan berbagai pendekatan politik maupun pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MSG masih menjadi arena strategis bagi kelompok pendukung Papua untuk memperoleh legitimasi politik internasional sehingga Indonesia harus terus mengelola hubungan dengan negara-negara Melanesia untuk menjaga kepentingan nasionalnya. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa isu Papua telah berkembang menjadi persoalan regional yang tidak lagi terbatas pada lingkup domestik Indonesia (Hanafi dan Annahda, 2022).

Berikutnya, penelitian Anggeng Dewanti (2025) berjudul “Kebijakan Luar Negeri Vanuatu dalam Internasionalisasi Isu HAM di Papua dalam Dewan Majelis PBB Tahun 2016–2021” menjelaskan bagaimana Vanuatu secara konsisten memanfaatkan forum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengangkat isu HAM Papua ke tingkat internasional. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa Vanuatu memandang masyarakat Papua sebagai bagian dari rumpun Melanesia yang memiliki kedekatan historis dan kultural dengan masyarakat Vanuatu. Berdasarkan perspektif tersebut, Vanuatu secara berulang menggunakan forum internasional untuk menyuarakan dugaan pelanggaran HAM di Papua dan mendorong perhatian komunitas internasional terhadap isu tersebut. Penelitian ini memperlihatkan bahwa identitas Melanesia telah

menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi orientasi kebijakan luar negeri Vanuatu terhadap Papua (Dewanti, 2025).

Selain itu, penelitian Elvira Rumkabu (2022) berjudul “Analisa Dampak Pembangunan terhadap Identitas dan Resistansi Papua” menyoroti hubungan antara pembangunan, identitas Papua, dan munculnya berbagai bentuk resistansi sosial maupun politik. Penelitian tersebut menemukan bahwa berbagai program pembangunan sejak era Orde Baru hingga pemerintahan Joko Widodo masih dipersepsikan sebagian masyarakat Papua sebagai kebijakan yang bersifat top-down, paternalistik, dan belum sepenuhnya menjawab rasa keadilan masyarakat asli Papua. Akibatnya, pembangunan tidak selalu dipahami sebagai instrumen kesejahteraan, tetapi dalam beberapa kasus justru menjadi bagian dari narasi yang memperkuat identitas kolektif Papua dan berbagai bentuk resistansi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa isu pembangunan, diskriminasi, dan HAM semakin sering digunakan dalam advokasi Papua baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional (Rumkabu, 2022).

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu tersebut, terdapat persamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama membahas Papua dalam konteks hubungan internasional, identitas Melanesia, dan dinamika dukungan negara-negara Pasifik Selatan terhadap isu Papua. Akan tetapi, terdapat perbedaan mendasar pada fokus kajian. Penelitian Muhammad Riza Hanafi dan Isnin Nabila Annahda berfokus pada diplomasi Indonesia dalam MSG, penelitian Anggeng Dewanti menitikberatkan pada kebijakan luar negeri Vanuatu dalam internasionalisasi isu HAM Papua, sedangkan penelitian Elvira Rumkabu lebih menyoroti hubungan antara pembangunan dan resistansi di Papua. Sementara itu, penelitian ini secara khusus mengkaji bagaimana identitas Melanesia dikonstruksikan dalam wacana digital negara-negara Pasifik Selatan terkait isu Papua. Dengan menggunakan konsep Political Netnography yang dikembangkan oleh Robert V. Kozinets dan Rossella Gambetti, penelitian ini tidak hanya melihat kebijakan negara atau dinamika diplomasi formal, tetapi juga menelaah bagaimana narasi, simbol, solidaritas, dan identitas Melanesia diproduksi, direproduksi, serta disebarluaskan melalui ruang digital.

Lebih lanjut, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan akademik yang belum banyak dibahas dalam studi sebelumnya. Sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada dimensi diplomasi negara, kebijakan luar negeri, konflik, pembangunan, dan organisasi regional seperti MSG maupun Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di sisi lain, perkembangan media sosial dan platform digital telah mengubah cara identitas politik dibentuk dan disebarluaskan lintas batas negara. Hingga saat ini masih sangat terbatas penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana identitas Melanesia dikonstruksikan dalam ruang digital negara-negara Pasifik Selatan untuk membingkai

isu Papua, serta bagaimana konstruksi tersebut memengaruhi persepsi publik regional terhadap Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menggunakan pendekatan Political Netnography guna memahami dinamika identitas, interaksi digital, dan pembentukan opini transnasional yang berkembang di kawasan Pasifik Selatan.

Di samping itu, terdapat anomali yang menarik untuk dikaji dalam penelitian ini. Selama satu dekade pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerintah Indonesia telah mengalokasikan dana otonomi khusus dalam jumlah besar, membangun berbagai infrastruktur strategis, memperluas akses pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan konektivitas wilayah Papua. Namun, di tengah berbagai capaian pembangunan tersebut, isu pelanggaran HAM dan konflik Papua tetap menjadi perhatian masyarakat internasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan pembangunan dan kesejahteraan tidak secara otomatis menghilangkan berbagai narasi kritik yang berkembang mengenai Papua. Akibatnya, berbagai aktor di kawasan Pasifik Selatan terus membingkai isu Papua melalui perspektif solidaritas Melanesia dan hak-hak masyarakat adat. Jika dinamika tersebut tidak dikelola dengan baik melalui diplomasi dan komunikasi strategis, maka dapat memengaruhi citra Indonesia di kawasan Pasifik Selatan sekaligus menciptakan tantangan baru bagi upaya Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan atas Papua.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana konstruksi identitas Melanesia dibentuk dan direproduksi dalam wacana digital negara-negara Pasifik Selatan terkait isu Papua dengan menggunakan konsep netnografi yang dikembangkan oleh Robert V. Kozinets dan Rossella Gambetti. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya memahami pola interaksi, simbol, narasi, serta bentuk solidaritas yang muncul dalam ruang digital ketika membahas Papua. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis bagaimana Indonesia merespons konstruksi identitas tersebut melalui kebijakan, diplomasi, dan strategi komunikasi yang dilakukan terhadap negara-negara Pasifik Selatan dalam konteks isu Papua.

Dengan memperhatikan perkembangan wacana digital mengenai isu Papua yang berkembang terkait kawasan Pasifik Selatan, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan penelitian “Bagaimana identitas Melanesia dikonstruksikan dalam wacana digital negara-negara Pasifik Selatan terkait isu Papua, serta bagaimana Indonesia merespons konstruksi identitas tersebut melalui pendekatan diplomatik yang ditempuhnya?” Pertanyaan tersebut diajukan untuk memahami bagaimana identitas Melanesia digunakan dalam berbagai narasi mengenai Papua yang muncul melalui pemberitaan dan forum internasional, serta bagaimana respons Indonesia hadir dalam

ruang yang sama melalui pernyataan diplomatik dan pendekatan kerja sama dengan kawasan Pasifik Selatan.

Metode Penelitian

Sebagai langkah untuk memahami secara mendalam konstruksi identitas Melanesia dalam wacana digital negara-negara Pasifik Selatan terkait isu Papua, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti mengkaji fenomena sosial dan politik secara holistik melalui interpretasi terhadap berbagai sumber data yang relevan. Dalam penelitian kualitatif berbasis studi pustaka, data diperoleh melalui proses penelusuran, pengumpulan, dan rekonstruksi informasi dari berbagai sumber ilmiah yang telah dipublikasikan sebelumnya sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti (Kamaruddin, et al., 2022, h. 57). Dengan demikian, metode ini dinilai sesuai untuk menjelaskan bagaimana identitas Melanesia dibentuk, diproduksi, dan direproduksi dalam berbagai wacana digital yang berkaitan dengan isu Papua.

Selanjutnya, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berasal dari berbagai dokumen tertulis yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian. Data tersebut mencakup buku akademik, artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, dokumen resmi organisasi internasional maupun pemerintah, publikasi lembaga riset, serta berbagai berita daring dari media yang kredibel dan dapat diakses secara terbuka. Pemanfaatan berbagai jenis sumber sekunder tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai identitas Melanesia, dinamika isu Papua, hubungan Indonesia dengan negaranegara Pasifik Selatan, serta perkembangan wacana digital yang muncul di berbagai platform daring. Penggunaan beragam sumber juga dilakukan untuk meningkatkan kedalaman analisis dan memperkuat validitas temuan penelitian melalui proses triangulasi data (Sulung dan Muspawi, 2024, h. 114).

Berikutnya, proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis dengan memanfaatkan berbagai basis data akademik dan sumber informasi daring terbuka. Dalam proses tersebut, peneliti menggunakan kata kunci yang berkaitan dengan identitas Melanesia, Papua, Pasifik Selatan, HAM Papua, diplomasi Indonesia, netnografi, serta berbagai istilah lain yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang ditemukan kemudian diseleksi berdasarkan kesesuaian tema, kredibilitas sumber, serta keterkaitannya dengan rumusan masalah penelitian sehingga hanya informasi yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik yang digunakan dalam proses analisis (Febrianto, et al., 2024, h. 263).

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif-kualitatif dengan mengadopsi konsep *Political Netnography* yang dikembangkan oleh Robert V. Kozinets dan Rossella Gambetti. Melalui pendekatan ini, peneliti tidak hanya mengidentifikasi isi informasi yang muncul dalam ruang digital, tetapi juga menelaah pola interaksi, simbol, narasi, makna kolektif, serta konstruksi identitas yang berkembang dalam komunitas daring. Analisis dilakukan dengan mengkaji bagaimana identitas Melanesia direpresentasikan oleh berbagai aktor di negara-negara Pasifik Selatan ketika membahas isu Papua, bagaimana narasi solidaritas Melanesia dibentuk dan disebarluaskan dalam ruang digital, serta bagaimana Indonesia merespons konstruksi identitas tersebut dalam konteks hubungan diplomatik dan pengelolaan isu Papua. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk menjelaskan keterkaitan antara identitas, wacana digital, dan dinamika politik regional yang berkembang di kawasan Pasifik Selatan.

Hasil dan Pembahasan

Dalam penelitian ini, konsep *political netnography* yang dikembangkan oleh Robert V. Kozinets dan Rossella Gambetti digunakan sebagai landasan konseptual untuk menganalisis bagaimana identitas Melanesia dikonstruksikan dalam berbagai wacana digital negara-negara Pasifik Selatan terkait isu Papua, serta bagaimana Indonesia merespons konstruksi identitas tersebut melalui berbagai pendekatan diplomatik yang ditempuhnya. Pemilihan konsep ini didasarkan pada karakteristik penelitian yang berfokus pada berbagai bentuk komunikasi politik dan narasi yang berkembang dalam ruang digital, terutama melalui pemberitaan media daring yang memuat pandangan negara-negara Pasifik Selatan mengenai Papua beserta respons yang disampaikan oleh Indonesia. Dalam hal tersebut, identitas Melanesia tidak hanya dipahami sebagai kedekatan etnis dan budaya, tetapi juga sebagai identitas kolektif yang dibentuk, dipertahankan, dan diperdebatkan melalui berbagai praktik komunikasi yang berkembang di ruang digital. Konstruksi identitas tersebut menjadi penting untuk dikaji karena berbagai narasi yang berkembang mengenai Papua tidak hanya berkaitan dengan solidaritas Melanesia, tetapi juga berimplikasi terhadap citra Indonesia di tingkat internasional, persepsi mengenai kedaulatan Indonesia atas Papua, serta perkembangan hubungan Indonesia dengan negara-negara Pasifik Selatan. Oleh karena itu, *political netnography* dipandang relevan untuk digunakan karena mampu memberikan kerangka analisis yang sesuai dalam menjelaskan bagaimana identitas, makna, dan berbagai narasi politik diproduksi dalam ruang digital serta bagaimana Indonesia menghadirkan respons diplomatik terhadap perkembangan wacana tersebut.

Political netnography merupakan penggunaan pendekatan netnografi untuk memahami berbagai fenomena politik yang muncul di ruang media sosial. Netnografi

sendiri adalah metode yang mengadaptasi ethnography dan pendekatan penelitian kualitatif lainnya untuk memahami pengalaman budaya melalui jejak digital, hubungan antar pengguna, serta pola interaksi yang terbentuk di media sosial, dengan dasar utama dari ilmu antropologi yang menekankan penggunaan data empiris. *Political netnography* dapat dipahami sebagai cabang dari netnografi yang secara khusus mengkaji isu-isu politik yang terbentuk karena pengaruh media sosial maupun yang mempengaruhi media sosial itu sendiri, terutama yang berkaitan dengan bagaimana kekuasaan dan sumber daya didistribusikan dalam masyarakat digital. Pendekatan ini digunakan untuk membantu proses pengumpulan dan analisis data terkait aktivitas politik di media sosial agar lebih terarah sesuai tujuan penelitian. Secara umum, *political netnography* terbagi menjadi tiga fokus kajian, yaitu kajian terhadap praktik politik yang bersifat formal, kajian terhadap cara masyarakat merespons atau berinteraksi dengan institusi politik, serta kajian terhadap pengalaman politik yang muncul dalam aktivitas sehari-hari di media sosial (Kozinets dan Gambetti, 2021, h. 103-105).

Konsep ideologi dalam netnography berkaitan dengan kekuasaan dan dapat dipahami melalui discourse analysis yang melihat bagaimana suatu kelompok membangun dan menyebarkan sistem gagasan dalam interaksi sosial, termasuk di media sosial. Ideologi dipahami sebagai “system of ideas” yang dimiliki oleh anggota kelompok dan terbentuk dari pengetahuan sosial yang mereka bagi bersama. Ideologi ini membentuk cara kelompok memahami identitas dirinya sekaligus memengaruhi bagaimana mereka memandang kelompok lain di luar dirinya. Dalam analisis netnografi, peneliti dapat melihat bagaimana anggota kelompok mendefinisikan siapa mereka, termasuk batasan antara anggota dan non anggota kelompok, serta kategori identitas seperti gender, etnis, dan karakteristik pembeda lainnya. Selain itu, peneliti juga dapat mengkaji tindakan apa yang dianggap penting oleh kelompok, alasan keberadaan kelompok tersebut, nilai serta aturan mengenai hal yang dianggap baik dan buruk, posisi kelompok dalam masyarakat, hubungan dengan kelompok lain, serta sumber daya yang dianggap paling penting dalam kelompok tersebut (Kozinets dan Gambetti, 2021, h. 108).

Political netnography pada dasarnya merupakan metode untuk mengamati dan menganalisis aktivitas politik di media sosial dengan menggunakan data dari pengguna sebagai sumber utama dalam penyusunan strategi politik. Metode etnografi sebelumnya telah banyak digunakan dalam bidang pemasaran untuk memahami kehidupan sehari-hari masyarakat melalui cerita dan pengalaman mereka, sehingga membantu dalam menemukan kebutuhan yang belum terpenuhi serta merancang strategi yang lebih sesuai. Dalam politik, *political netnography* digunakan untuk mempelajari pesan, narasi, interaksi, serta respons masyarakat di media sosial agar

dapat memahami bagaimana individu dan kelompok memaknai komunikasi politik. Analisis ini dilakukan pada berbagai jenis komunitas daring seperti komunitas resmi milik aktor politik, kelompok pendukung yang dibentuk oleh warga, komunitas oposisi, komunitas anti-brand, komunitas aktivis, serta forum non-politik yang juga membahas isu politik. Dari proses pengamatan tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi pola percakapan dan isu-isu yang sedang berkembang di masyarakat secara lebih terstruktur. Hasil analisis ini kemudian dapat dimanfaatkan untuk membantu penyusunan strategi kampanye serta memantau opini publik di media sosial secara lebih terarah (Kozinets dan Gambetti, 2021, h. 109-111).

Konstruksi Identitas Melanesia dalam Wacana Digital Negara-Negara Pasifik Selatan terkait Isu Papua

Untuk memahami pembentukan identitas Melanesia dalam wacana digital mengenai Papua, terlebih dahulu perlu dijelaskan pengertian Melanesia sebagai identitas yang memiliki dimensi geografis sekaligus kultural. Berdasarkan Encyclopaedia Britannica, Melanesia merupakan wilayah etnogeografis di Samudra Pasifik yang mencakup Pulau New Guinea, Kepulauan Solomon, Vanuatu, Kaledonia Baru, Fiji, serta sejumlah pulau kecil lainnya. Pulau New Guinea memiliki arti penting karena bagian baratnya merupakan wilayah Papua yang berada di bawah kedaulatan Indonesia, sedangkan bagian timurnya menjadi wilayah negara Papua New Guinea yang telah merdeka. Britannica juga menjelaskan bahwa masyarakat Melanesia memiliki latar sejarah, budaya, dan identitas yang terbentuk melalui pengalaman kolonial, tradisi yang berkembang di masing-masing wilayah, serta kesadaran bersama yang dikenal sebagai the Melanesian way. Sejak tahun 1970-an, kesadaran tersebut berkembang menjadi landasan identitas politik dan budaya bagi masyarakat di kawasan Pasifik. Kondisi ini menyebabkan masyarakat asli Papua yang termasuk dalam rumpun Melanesia kerap dipandang oleh sejumlah negara di Pasifik Selatan sebagai bagian dari komunitas Melanesia yang melampaui batas-batas negara modern (Kahn, 2026).

Selanjutnya, artikel berjudul "For the Melanesian Spearhead Group, West Papua Presents a Challenge" yang ditulis oleh Grant Wyeth dalam The Diplomat pada 28 Agustus 2023 memperlihatkan bagaimana identitas Melanesia dibangun dalam berbagai wacana di ruang digital sebagai landasan legitimasi politik bagi perjuangan Papua. Artikel tersebut mengulas penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi ke-22 MSG di Port Vila, Vanuatu, pada Agustus 2023, serta menjelaskan bahwa tuntutan ULMWP untuk memperoleh status keanggotaan penuh di MSG didasarkan pada pandangan bahwa masyarakat Papua merupakan bagian dari bangsa Melanesia yang berhak mendapatkan representasi dalam organisasi kawasan tersebut. Selain itu, artikel tersebut juga mengacu pada dokumen pendirian MSG tahun 1986 yang menegaskan pentingnya semangat dekolonisasi dan penguatan identitas budaya

Melanesia (Wyeth, 2023). Dalam kajian netnografi, konstruksi identitas tersebut menunjukkan bahwa identitas Melanesia yang berkembang di ruang digital tidak hanya dipahami sebagai identitas budaya semata, tetapi juga dimanfaatkan sebagai sarana politik untuk membingkai isu Papua sebagai bagian dari perjuangan masyarakat Melanesia di kawasan Pasifik Selatan.

Berikutnya, artikel “Melanesian Leaders Group Decides West Papua Independence Body Does Not Meet ‘Existing Criteria’ to Join” oleh Stephen Dziedzic dan Bill Birtles (2023) menggambarkan adanya perbedaan pandangan terkait identitas Melanesia di tingkat regional. Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa para pemimpin MSG yang bertemu di Port Vila memutuskan bahwa ULMWP belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk bergabung sebagai anggota organisasi. Namun demikian, pemberitaan ABC News juga menunjukkan bahwa isu Papua tetap menjadi topik yang paling sering muncul dalam pertemuan tersebut, meskipun agenda lain seperti perubahan iklim dan keamanan kawasan turut dibahas (Dziedzic, 2023). Dalam sudut pandang netnografi, pemberitaan ini memperlihatkan bahwa media digital di kawasan Pasifik Selatan terus membingkai hubungan antara Papua dan identitas Melanesia melalui narasi yang mengaitkan Papua dengan solidaritas kawasan serta posisinya dalam komunitas etnokultural Pasifik. Setiap pembahasan mengenai Papua cenderung ditempatkan dalam kerangka yang menghubungkannya dengan keterikatan kultural Melanesia dan relevansinya bagi negara-negara di Pasifik Selatan.

Lebih lanjut, publikasi “MSG Throws Away Golden Chance to Reset Peace and Justice for West Papua” yang ditulis oleh David Robie dalam Asia Pacific Report pada 26 Agustus 2023 yang menunjukkan bentuk konstruksi identitas Melanesia yang lebih eksplisit dalam ruang digital. Dalam artikel tersebut, keputusan MSG untuk tidak menerima ULMWP sebagai anggota penuh digambarkan sebagai bentuk kegagalan organisasi Melanesia dalam menunjukkan solidaritas terhadap sesama bangsa Melanesia. Robie bahkan menyebut keputusan tersebut sebagai ancaman terhadap “Melanesian credibility and solidarity”, yang secara langsung menghubungkan isu Papua dengan kredibilitas identitas kolektif Melanesia itu sendiri (Robie, 2023). Dari sudut pandang netnografi politik, penggunaan istilah seperti *solidarity*, *justice*, *human rights*, dan *Melanesian credibility* menunjukkan adanya proses pembentukan makna bersama yang berusaha menempatkan dukungan terhadap Papua sebagai kewajiban moral komunitas Melanesia. Dengan demikian, wacana digital yang berkembang tidak hanya membahas Papua sebagai isu politik atau HAM semata, tetapi juga sebagai simbol solidaritas identitas Melanesia yang melampaui batas-batas negara di kawasan Pasifik Selatan.

Narasi Kritik Negara-Negara Pasifik Selatan terhadap Papua dalam Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa

Sebagai negara yang paling konsisten mengangkat isu Papua di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Vanuatu berulang kali menyampaikan kritik terhadap Indonesia dengan menyoroti dugaan pelanggaran HAM di Papua. Pada Sidang Majelis Umum PBB ke-76 yang berlangsung di New York pada September 2021, Perdana Menteri Vanuatu Bob Loughman menyatakan bahwa masyarakat adat Papua masih mengalami penderitaan akibat dugaan pelanggaran HAM dan meminta komunitas internasional melalui mekanisme PBB untuk memberikan perhatian yang lebih serius terhadap situasi tersebut. Dalam pidatonya, Vanuatu juga menilai bahwa kemajuan penanganan persoalan Papua masih sangat terbatas sehingga diperlukan pengawasan internasional yang lebih kuat. Posisi ini menunjukkan bahwa Vanuatu secara konsisten membingkai isu Papua sebagai isu HAM internasional yang layak dibahas dalam forum multilateral global (Wahana Karunia Media, 2021).

Selanjutnya, Kepulauan Solomon juga menjadi salah satu negara Pasifik Selatan yang beberapa kali menyoroti Papua dalam forum PBB. Dalam berbagai sidang internasional, pemerintah Kepulauan Solomon menyampaikan dukungan terhadap upaya pemantauan kondisi HAM di Papua dan menilai bahwa akses bagi mekanisme HAM internasional perlu diperluas. Sikap tersebut menunjukkan bahwa Papua tidak hanya dipandang sebagai isu domestik Indonesia, melainkan sebagai isu regional yang memiliki keterkaitan dengan solidaritas masyarakat Melanesia. Dukungan Kepulauan Solomon terhadap pembahasan Papua di forum internasional juga memperlihatkan adanya kesinambungan narasi yang berkembang di kawasan Pasifik Selatan mengenai perlindungan hak-hak masyarakat adat Melanesia (Wahana Karunia Media, 2021).

Berikutnya, Republik Nauru turut menjadi bagian dari kelompok negara Pasifik yang mengangkat isu Papua dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam Sidang Majelis Umum PBB tahun 2021, Nauru menyoroti pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia dan mendukung perhatian internasional terhadap berbagai laporan yang berkembang mengenai kondisi Papua. Meskipun secara geografis dan demografis merupakan negara kecil, Nauru memanfaatkan forum multilateral untuk menyampaikan pandangannya mengenai isu tersebut. Keterlibatan Nauru menunjukkan bahwa perhatian terhadap Papua tidak hanya berasal dari negara-negara besar di kawasan, tetapi juga dari negara-negara kepulauan kecil yang memiliki kepentingan normatif terhadap isu HAM dan masyarakat adat (Wahana Karunia Media, 2021).

Selain Nauru, Tuvalu secara konsisten memasukkan isu Papua ke dalam berbagai pernyataan diplomatiknya di forum internasional. Dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-

76 tahun 2021, Tuvalu kembali menyerukan perhatian terhadap kondisi HAM di Papua dan mendukung keterlibatan mekanisme internasional untuk memperoleh informasi yang lebih transparan mengenai situasi di wilayah tersebut. Narasi yang dibangun Tuvalu cenderung menempatkan Papua dalam kerangka perlindungan HAM universal sehingga isu tersebut diposisikan sebagai bagian dari tanggung jawab komunitas internasional. Dengan demikian, kritik yang disampaikan tidak hanya berangkat dari kedekatan kawasan Pasifik, tetapi juga dari prinsip-prinsip normatif yang menjadi bagian dari diplomasi luar negeri Tuvalu (Wahana Karunia Media, 2021).

Lebih lanjut, Marshall Islands juga tercatat sebagai negara yang pernah menyuarakan keprihatinan terhadap Papua dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pemerintah Marshall Islands mendukung perhatian internasional terhadap laporan-laporan yang berkaitan dengan kondisi HAM di Papua dan mendorong keterlibatan mekanisme HAM internasional dalam memperoleh informasi yang objektif. Posisi tersebut memperlihatkan bahwa isu Papua telah berkembang menjadi bagian dari agenda diplomatik beberapa negara Pasifik yang memandang perlindungan HAM sebagai aspek penting dalam tata kelola global. Oleh karena itu, Papua tidak lagi dipersepsikan semata sebagai persoalan bilateral antara Indonesia dan kelompok separatis, tetapi juga sebagai isu yang memperoleh perhatian dari komunitas regional Pasifik (Wahana Karunia Media, 2021).

Sementara itu, Palau juga termasuk negara Pasifik yang beberapa kali memberikan perhatian terhadap isu Papua dalam berbagai forum internasional. Melalui dukungannya terhadap pembahasan HAM dan hak masyarakat adat di Papua, Palau ikut memperkuat upaya internasionalisasi isu tersebut di tingkat global. Keterlibatan Palau menunjukkan bahwa dukungan terhadap Papua tidak hanya berasal dari negara-negara yang memiliki hubungan etnokultural Melanesia yang kuat, tetapi juga dari negara-negara Pasifik lainnya yang memandang isu HAM sebagai bagian dari komitmen diplomatik mereka. Dengan demikian, forum PBB menjadi arena penting bagi negara-negara Pasifik Selatan untuk membangun perhatian internasional terhadap Papua (Wahana Karunia Media, 2021).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa negara-negara Pasifik Selatan secara aktif membangun dan mereproduksi narasi mengenai Papua melalui kombinasi ruang diplomasi formal dan ruang digital. Dalam perspektif Political Netnography, pidato para pemimpin Vanuatu, Kepulauan Solomon, Nauru, Tuvalu, Marshall Islands, dan Palau tidak berhenti sebagai pernyataan resmi di forum PBB, melainkan menjadi materi yang terus disebarluaskan melalui media daring, portal berita internasional, organisasi masyarakat sipil, dan berbagai platform digital lainnya. Proses ini menghasilkan pembentukan identitas kolektif yang menempatkan Papua sebagai bagian dari

komunitas Melanesia yang dianggap membutuhkan solidaritas regional. Narasi tersebut kemudian menciptakan batas identitas antara kelompok yang dipersepsikan sebagai bagian dari komunitas Melanesia dan aktor yang dianggap berada di luar komunitas tersebut. Dalam konteks ini, isu HAM berfungsi sebagai instrumen ideologis yang memperkuat legitimasi solidaritas Melanesia, sementara ruang digital berperan sebagai arena utama dalam penyebaran makna, simbol, dan persepsi politik mengenai Papua kepada audiens regional maupun internasional.

Respons Diplomatik Indonesia terhadap Narasi Papua di Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa

Sebagai respons terhadap kritik negara-negara Pasifik Selatan di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia secara konsisten menggunakan hak jawab (*right of reply*) untuk menegaskan posisi resminya mengenai Papua. Dalam artikel “Indonesia ke Vanuatu: Anda Bukan Perwakilan Papua, Berhentilah Berfantasi” yang ditulis oleh Vina Fadhotul Mukaromah dan diterbitkan Kompas.com pada 28 September 2020, dijelaskan bahwa diplomat Indonesia Silvany Austin Pasaribu memberikan tanggapan langsung terhadap pidato Vanuatu dalam Sidang Umum PBB ke-75. Dalam pernyataannya, Silvany menegaskan bahwa Vanuatu tidak memiliki legitimasi untuk mengklaim mewakili masyarakat Papua dan menyatakan bahwa isu Papua merupakan urusan domestik Indonesia yang harus dihormati berdasarkan prinsip kedaulatan dan integritas wilayah sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB. Pernyataan “*You are not the representative of the people of Papua and please stop fantasizing to be one*” menjadi salah satu bentuk respons diplomatik Indonesia yang menunjukkan penolakan tegas terhadap upaya internasionalisasi isu Papua oleh Vanuatu (Mukaromah, 2020).

Selanjutnya, respons serupa kembali disampaikan Indonesia ketika Vanuatu mengangkat isu Papua dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-76 pada 25 September 2021. Dalam pemberitaan “Vanuatu Ungkit Isu Papua di PBB, Diplomat RI Beri Jawaban Menohok” yang diterbitkan oleh Bisnis.com pada 26 September 2021, dijelaskan bahwa Perdana Menteri Vanuatu Bob Loughman kembali menuduh adanya pelanggaran HAM di Papua dan meminta akses kunjungan bagi mekanisme HAM internasional. Menanggapi hal tersebut, Sindy Nur Fitri selaku Sekretaris Ketiga Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk PBB di New York menegaskan bahwa Vanuatu secara sengaja mengabaikan tindakan kekerasan yang dilakukan kelompok separatis bersenjata di Papua terhadap tenaga kesehatan, guru, pekerja konstruksi, dan aparat keamanan. Indonesia juga menilai bahwa Vanuatu terus menggunakan isu Papua untuk kepentingan politik tertentu dan tidak menunjukkan perhatian yang seimbang terhadap korban kekerasan yang ditimbulkan oleh kelompok separatis (Tuwo, 2023).

Berikutnya, perkembangan yang cukup penting terlihat pada Sidang Majelis Umum PBB ke-78 yang berlangsung di New York pada September 2023. Dalam artikel “Tidak Ada Negara Singgung Isu Papua pada Sidang Majelis Umum PBB 2023” yang diterbitkan oleh Kumparan pada 29 September 2023, dijelaskan bahwa tidak satu pun negara mengangkat isu Papua selama berlangsungnya sidang tersebut. Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI, Tri Tharyat, menyatakan bahwa kondisi tersebut menunjukkan semakin kuatnya pengakuan internasional terhadap kedaulatan Indonesia atas Papua. Ia menjelaskan bahwa Indonesia secara aktif melakukan dialog diplomatik dengan berbagai negara mengenai pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, serta berbagai kemajuan yang terjadi di Papua. Menurut Tri, pendekatan diplomasi yang menekankan pembangunan dan komunikasi berkelanjutan dengan negara-negara lain menghasilkan tanggapan yang positif sehingga isu Papua tidak lagi memperoleh perhatian sebesar tahun-tahun sebelumnya dalam forum Majelis Umum PBB (Tuwo, 2023).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa respons Indonesia terhadap narasi Papua di forum PBB tidak hanya dilakukan melalui jalur diplomasi formal, tetapi juga melalui upaya pembentukan narasi tandingan yang kemudian disebarluaskan dalam ruang digital internasional. Dari sudut pandang *Political Netnography*, pemerintah Indonesia berupaya membangun identitas Papua sebagai bagian yang sah dan tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui berbagai pesan yang menekankan kedaulatan negara, pembangunan wilayah, perlindungan masyarakat, dan penolakan terhadap separatisme. Di sisi lain, negara-negara Pasifik Selatan membangun narasi alternatif yang menempatkan Papua sebagai bagian dari solidaritas Melanesia dan isu HAM internasional. Interaksi kedua narasi tersebut menghasilkan kontestasi makna dalam ruang digital, di mana media daring, portal berita internasional, dan berbagai platform komunikasi menjadi arena utama bagi produksi serta reproduksi identitas politik terkait Papua. Dengan demikian, respons diplomatik Indonesia dapat dipahami bukan sekadar sebagai pembelaan terhadap kedaulatan negara, melainkan juga sebagai upaya mempertahankan legitimasi identitas Papua dalam wacana internasional yang terus diperdebatkan secara digital.

***Look East Policy* sebagai Strategi Diplomati Indonesia dalam Memperkuat Hubungan dengan Kawasan Pasifik Selatan**

Sebagai bentuk respons terhadap internasionalisasi isu Papua di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia secara konsisten memanfaatkan mekanisme *right of reply* untuk menegaskan posisi resminya. Dalam artikel “Vanuatu Ungkit Isu Papua di PBB, Diplomat RI Beri Jawaban Menohok” yang diterbitkan oleh *Bisnis.com* pada 26 September 2021, dijelaskan bahwa pada Sidang Majelis Umum PBB ke-76 di New York, Perdana Menteri Vanuatu Bob Loughman kembali mengangkat isu dugaan pelanggaran

HAM di Papua. Menanggapi hal tersebut, Sindy Nur Fitri selaku Sekretaris Ketiga Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk PBB menegaskan bahwa Vanuatu secara selektif mengabaikan berbagai tindakan kekerasan yang dilakukan kelompok separatis bersenjata di Papua terhadap tenaga kesehatan, guru, pekerja konstruksi, dan masyarakat sipil. Indonesia juga menegaskan bahwa Papua merupakan bagian sah dari wilayah kedaulatan Indonesia berdasarkan prinsip integritas teritorial yang diakui oleh hukum internasional. Respons tersebut menunjukkan bahwa diplomasi Indonesia di PBB tidak hanya berfokus pada penolakan tuduhan pelanggaran HAM, tetapi juga berupaya membangun narasi bahwa ancaman keamanan yang terjadi di Papua turut berasal dari aktivitas kelompok separatis bersenjata (Gunawan, 2021).

Selanjutnya, perkembangan yang berbeda terlihat pada penyelenggaraan Sidang Majelis Umum PBB ke-78 pada September 2023. Dalam artikel “Tidak Ada Negara Singgung Isu Papua pada Sidang Majelis Umum PBB 2023” dalam Kumparan pada 29 September 2023, Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI, Tri Tharyat, menyatakan bahwa tidak terdapat satu pun negara yang mengangkat isu Papua selama berlangsungnya sidang tersebut. Menurut Tri, kondisi tersebut dipengaruhi oleh semakin luasnya pemahaman negara-negara anggota PBB terhadap berbagai perkembangan di Papua, termasuk pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan program kesejahteraan yang dijalankan pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia juga terus melakukan komunikasi diplomatik dengan berbagai negara untuk menjelaskan perkembangan aktual di Papua sehingga isu tersebut tidak lagi memperoleh perhatian sebesar tahun-tahun sebelumnya dalam forum Majelis Umum PBB (Wahana Karunia Media, 2021).

Temuan tersebut menunjukkan adanya kontestasi narasi politik yang berlangsung dalam ruang digital dan forum diplomatik internasional secara bersamaan. Dalam perspektif Political Netnography, respons Indonesia dapat dipahami sebagai upaya membangun identitas alternatif terhadap Papua melalui produksi dan penyebaran narasi yang menekankan aspek pembangunan, kesejahteraan, integritas teritorial, dan perlindungan masyarakat sipil. Sementara itu, negara-negara Pasifik Selatan cenderung membingkai Papua melalui narasi HAM dan solidaritas Melanesia. Kedua narasi tersebut kemudian berinteraksi dalam berbagai media daring, pemberitaan internasional, dan forum multilateral sehingga membentuk arena kompetisi makna mengenai Papua. Dari sudut pandang ini, diplomasi Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hubungan antarnegara, tetapi juga sebagai strategi komunikasi politik untuk memengaruhi persepsi publik internasional terhadap identitas Papua dan posisi Indonesia di dalamnya.

Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa identitas Melanesia dikonstruksikan dan direproduksi secara aktif dalam wacana digital negara-negara Pasifik Selatan melalui narasi solidaritas budaya, hak asasi manusia, dan kedekatan historis dengan masyarakat Papua. Berbagai pemberitaan media daring, pernyataan politik, dan forum internasional menunjukkan bahwa Papua sering dibingkai sebagai bagian dari komunitas Melanesia yang melampaui batas negara modern. Dalam perspektif *Political Netnography*, konstruksi identitas tersebut tidak hanya berfungsi sebagai identitas kultural, tetapi juga menjadi instrumen politik yang digunakan untuk membangun legitimasi dukungan terhadap isu Papua. Sementara itu, Indonesia merespons konstruksi identitas tersebut melalui diplomasi formal di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa, penggunaan hak jawab terhadap kritik negara-negara Pasifik Selatan, penguatan hubungan bilateral dan regional, serta pembangunan narasi alternatif yang menekankan kedaulatan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat Papua. Dengan demikian, rumusan masalah penelitian telah terjawab, yaitu bahwa identitas Melanesia berperan penting dalam membentuk persepsi dan narasi negara-negara Pasifik Selatan mengenai Papua, sedangkan Indonesia berupaya mengelola narasi tersebut melalui berbagai instrumen diplomatik dan komunikasi politik internasional.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika isu Papua di tingkat internasional tidak hanya ditentukan oleh faktor politik dan diplomasi formal, tetapi juga oleh proses pembentukan identitas dan opini publik yang berkembang dalam ruang digital. Secara teoretis, penelitian ini memperluas penggunaan konsep *Political Netnography* dalam kajian hubungan internasional dengan menunjukkan bagaimana identitas kolektif dapat diproduksi dan dipertahankan melalui media digital. Secara praktis, hasil penelitian mengindikasikan pentingnya penguatan diplomasi publik, komunikasi strategis, dan dialog yang lebih inklusif dalam pengelolaan isu Papua di kawasan Pasifik Selatan. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan data sekunder berbasis studi pustaka dan berfokus pada analisis wacana digital tanpa melakukan observasi langsung terhadap komunitas daring maupun wawancara dengan aktor terkait. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan netnografi yang lebih mendalam dengan memanfaatkan data media sosial secara langsung, wawancara dengan pembuat kebijakan dan aktor masyarakat sipil, serta memperluas kajian pada dinamika persepsi publik di negara-negara Pasifik Selatan terhadap isu Papua dan hubungan Indonesia dengan kawasan tersebut.

Referensi

Barnes, P., Aninta, S., Ariyanto, T., Holle, M. J., Ikhawan, M., & Jayanto, H. (2023). The gap between policy and practice for human rights in conservation: a case study in Papua Province, Indonesia. *ORYX: The International Journal for Conservation*.

- Vol. 57(3), 360-369. Retrieved from <https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridgecore/content/view/DEBCD706FAC5A4528F6EA6276E76C784/S0030605323000066a.pdf/the-gap-between-policy-and-practice-for-human-rights-in-conservation-a-case-study-in-papua-province-indonesia.pdf>
- Blades, J. (2020). West Papua: The Issue That Won't Go Away for Melanesia. Retrieved from Lowy Institute: <https://www.lowyinstitute.org/publications/west-papua-issue-won-t-go-away-melanesia>
- Dewanti, A. (2025). KEBIJAKAN LUAR NEGERI VANUATU DALAM INTERNASIONALISASI ISU HAM DI PAPUA DALAM DEWAN MAJELIS PBB PADA TAHUN 2016-2021. *Global Insight Journal : Jurnal Mahasiswa Hubungan Internasional*. Vol. 1(2), 1-8. Retrieved from <https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/GIJ/article/view/2677>
- Dziedzic, S. (2023). *Melanesian leaders group decides West Papua independence body does not meet 'existing criteria' to join*. Retrieved from ABC News: <https://www.abc.net.au/news/2023-08-25/melanesian-spearhead-group-meeting-west-papua-independence/102772838>
- Febrianto, A., Siroj, R., & Hartatiana. (2024). Studi Literatur: Landasan Dalam Memilih Metode Penelitian Yang Tepat. *Journal Educational Research and Development*. Vol. 1(2), 259-263. Retrieved from <http://jurnal.globalscients.com/index.php/jerd/article/download/142/140>
- Gunawan, I. (2021). *Vanuatu Ungkit Isu Papua di PBB, Diplomat RI Beri Jawaban Menohok*. Retrieved from Bisnis Indonesia: <https://kabar24.bisnis.com/read/20210926/19/1446920/vanuatu-ungkit-isu-papua-di-pbb-diplomat-ri-beri-jawaban-menohok>
- Hanafi, M., & Annahda, I. (2022). Dukungan Vanuatu Terhadap Kemerdekaan West Papua: Tinjauan Konstruktivisme Holistik. *Andalas Journal of International Studies*. Vol. 11(1), 1-13. Retrieved from <https://ajis.fisip.unand.ac.id/index.php/ajis/article/view/577>
- Kahn, M. (2026). *Melanesian culture*. Retrieved from: <https://www.britannica.com/place/Melanesia>
- Kamaruddin, I., Firmansah, D., Zulkifli, Amane, A., Nasarudin, Samad, M., & Haerudin. (2022). *METODOLOGI PENELITIAN KUANTITATIF*. Padang: PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.
- Kozinets, R. V., & Gambetti, R. (Eds.). (2021). *Netnography unlimited: Understanding technoculture using qualitative social media research*. Routledge.
- Mukaromah, V. (2020). *Diingatkan Jangan Ikut Campur, Sudah Beberapa Kali Vanuatu Singgung Isu Papua di Sidang PBB*. Retrieved from <https://amp.kompas.com/tren/read/2020/09/28/133200465/diingatkan-jangan-ikut-campur-sudah-beberapa-kali-vanuatu-singgung-isu>

- Nafian, M. (2021). *Mengapa Konflik di Papua Tak Kunjung Usai?* Retrieved from <https://www.idntimes.com/news/indonesia/mengapa-konflik-di-papua-tak-kunjung-usai-00-rgfwk-wzb2cx>
- Özkoçak, L. (2024). The Use of Netnography in Covid-19 Studies in the Context of the Political Economy of Media. *IGSCONG'24*. 1-11. Retrieved from <https://avesis.anadolu.edu.tr/yayin/99f0cf58-e16a-4e5c-94ed-baefbabc1761/the-use-of-netnography-in-covid-19-studies-in-the-context-of-the-political-economy-of-media>
- Prasetyo, H. dan Zahidi, M.Si. (2022). Diplomasi Indonesia di Kawasan Pasifik Selatan dalam Rangka Menjaga Kedaulatan Papua. *Journal of Diplomacy and International Studies*. Vol. 5(02), 15-22. Retrieved from <https://journal.uir.ac.id/index.php/jdis/article/view/14605>
- Rumkabu, E. (2022). Analisa Dampak Pembangunan terhadap Identitas dan Resistansi Papua. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional: Edisi Khusus Papua*. Vol. 39-55. Retrieved from <https://journal.unpar.ac.id/index.php/JurnalIlmiahHubunganInternasional/article/view/5975>
- Sudana, K. (2024). External setting di kawasan Pasifik Selatan sebagai tantangan politik luar negeri Indonesia era pemerintahan Joko Widodo (2014-2023). *Journal of Government Science (GovSci) : Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 5(1), 1-12. Retrieved from <http://govsci.fisipunmul.ac.id/site/index.php/govsci/article/download/56/623>
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder dan Tersier. *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning and Studies (IICLS)*. Vol. 5(3), 110-116. Retrieved from https://iicls.org/index.php/jer/article/download/238/195?cfchltk=SUOXsgJOA9oyS7r1eg2zx1WWQ_lfESTCF8lN3fMCvs8-1781697266-1.0.1.1-QhIjMO1Tcz7EbWADP0RoiW1h.zKM6ie4fNjZ36ldvM
- Tuwo, A. (2023). *Tidak Ada Negara Singgung Isu Papua pada Sidang Majelis Umum PBB 2023*. Retrieved from <https://kumparan.com/kumparannews/tidak-ada-negara-singgung-isu-papua-pada-sidang-majelis-umum-pbb-2023-21HYzierQkm>
- Wahana Karunia Media. (2021). *Ini 6 Negara yang Selalu Menyinggung Isu Ham di Papua Pada Sidang PBB*. Retrieved from https://papua.wahananews.co/utama/ini-6-negara-yang-selalu-menyinggung-isu-ham-di-papua-pada-sidangpbb/0#post_wahana
- Wyeth, G. (2023). *For the Melanesian Spearhead Group, West Papua Presents a Challenge*. Retrieved from <https://thediplomat.com/2023/08/for-themelanesian-spearhead-group-west-papua-presents-a-challenge/>

Zahidi, M., & Othman, M. (2024). Human Rights Issue in Papua: A Systematic Literature Review. *UNISCI Journal*, 107-126. Retrieved from <https://www.unisci.es/wp-content/uploads/2024/05/UNISCIDP65-6SYAPRIN.pdf>